



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah. (n.d.). Pengaruh Jumlah Wajib Efektif Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang . 1-21.
- Destriyani, Gilang, Nenah Sudjana, Dwitmanto. (2014). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Penyitaan Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Malang Selatan. *Jurnal Perpajakan* Vol. 3 No 1 Desember 2014, 1-9.
- Direktorat Jenderal Pajak. "Laporan Tahunan DJP 2013." <http://laporantahunan.pajak.go.id/data-statistik>(diakses 15 Maret 2015).
- Direktorat Jenderal Pajak. Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep-86/PJ/2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak di Wilayah DKI Jakarta selain Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat.Jakarta
- Direktorat Jenderal Pajak. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE/60/PJ/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-20/PJ/2013. Jakarta
- Divianto (2013). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Baturaja. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi*. Vol 3 No. 3, 85-92.
- Fitriani,Nanik. (2013). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terdaftar dan Penerbitan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Bantul. *Jurnal Akuntansi*. Vol 1 No. 2, 730-740.
- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan progam SPSS 20*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia.

- Hariyanto, Y., Suhadak, & H, S. R. (n.d.). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak, dan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan . *Jurnal Administrasi Vol. 10 NO. 1* .
- Hasibuan, Indry Anggina, Yunilma & Popi Fauziati. 2014. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Padang ". Kumpulan Artikel Mahasiswa prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi wisuda ke-61 April 2014 Vol.4 No.1 2014. Padang: Universitas Bung Hatta.
- Hermawan, A. (2009). *Penelitian Bisnis* . Jakarta : Grasindo.
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & accounting review, Vol.1 No.1* .
- Hidayat, Rudi, Charoline Cheisviyanny. (2013). Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggal Pajak. *Jurnal WRA Vol 1 No 1 April, 1-20*.
- Ilyas, W. B., & Suhartono, R. (2012). *Perpajakan* . Jakaarta: Mitra Wacana M Media.
- Kementerian Keuangan RI. "Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2013 (Audited)." <http://www.kemenkeu.go.id/Publikasi/laporan-keuangan-pemerintah-pusat-2012-audited> (diakses pada tanggal 25 Mei 2014)
- Kementerian Keuangan RI. "Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2012 (Audited)." <http://www.kemenkeu.go.id/Publikasi/laporan-keuangan-pemerintah-pusat-2012-audited> (diakses pada tanggal 25 Mei 2014)
- Kementerian Keuangan RI. "Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2011 (Audited)." <http://www.kemenkeu.go.id/Publikasi/laporan-keuangan-pemerintah-pusat-2011-audited> (diakses pada tanggal 25 Mei 2014)
- Lainutu, A. (2013). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak PPh 21 Terhadap Penerimaan PPh 21 Pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA vol.1 No.3* , 374-382..

- Lind, Marchal, dan Wathen. 2010. *Statistical Techniques in Business and Economics*. McGraw Hill.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: ANDI.
- Nasution, R. H., Herawati, & Rifa, D. (n.d.). Pengaruh Inflasi, Jumlah Wajib Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Orang Pribadi di Kota Padang. 1-11.
- Oxford. (2012). *Advanced Learner's Dictionary*. Oxford.
- Pangemanan, R. N. (2013). Hubungan Jumlah dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Penerimaan PPh KPP Pratama Manado. *Jurnal Emba vol.1 No.13* , 730-740.
- Paseleng, A., Poputra, A. T., & Tangkuman, S. J. (2013). Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Emba Vol 1 No 4* , 2371-2381.
- Pemerintahan RI. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.
- Pemerintahan RI. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Jakarta.
- Pemerintahan RI. Surat Edaran Nomor SE-89/PJ/2009 tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak No Efektif. Jakarta.
- Pemerintahan RI. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jakarta.
- Pemerintahan RI. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-384/PJ/2003 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2001 Tentang Bentuk Surat Setoran Pajak. Jakarta.
- Pemerintahan RI. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.

- Pemerintahan RI. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi. Jakarta.
- Pertiwi, Diah Putri. (2014). Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Bandung Karees. *Jurnal Volume 18, Nomor 2, Agustus 2014*, 60-76
- Menteri Keuangan RI . Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.01/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Menteri Keuangan RI . Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK,03/2012 Tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Jakarta.
- Menteri Keuangan RI . Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.011/2012. Jakarta.
- Menteri Keuangan RI . Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan. Jakarta.
- Merdeka.(2014). "Jumlah Penduduk RI Diprediksi Tembus 255 Juta Jiwa Pada 2015" <http://www.merdeka.com/uang/jumlah-penduduk-ri-diprediksi-tembus-255-juta-jiwa-pada-2015.html>(diakses 15 Maret 2015)
- Rahmawati, Fajar Nur, Sigit Santoso, Nurhasan Hamidi. 2014. Pengaruh Pemeriksaan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Surakarta. *Jupe UNS*, Vol 3 No 1, 72-82.
- Resmi, S. (2013). *Pengantar Perpajakan : Teori dan Kasus* . Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Maria. M Ratna & Afriyanti, N. N. (n.d.). "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPh pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Denpasar Timur". *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* Vol.7, No.2. Januari 2012. 1-21.

Sekaran, U., & Roger, B. (2010). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach, 5th Edition*. United Kingdom : John Wiley & Sons, Inc.

Sinulingga, E. E. (2013). Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2000. *Lex Administratum Vol.1 No.1* , 14-29.

Suandi, E. (2011). *Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Sutanto, Paojan Mas'ud. (2014). *Perpajakan Indonesia (Teori dan Aplikasi)* . Jakarta: Mitra Wacana Media.

Syahab, Z. M., & Gisijanto, H. A. (2008). Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan . *Jurnal Ekonomi Bisnis No.2 Vol 13* , 137-152.

Vegirawati, T. (2011). Hubungan Antara Penerbitan Surat Tagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi Vol.1 No.3* , 266-274.

W, D. F., & Saputra, P. M. (2009). Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi . *Journal of Indonesian Applied Econimics* , 135-149.

Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. (2014). *Akuntansi Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.

Wella, Adriyanti. (2014). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Tanjungpinang.

